



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 September 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SUB UNIT KERJA : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZUBAIDAH HANOUM
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 83637

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.580.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/250 m2 di ACEH SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/250 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
3. Tanah Seluas 554 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 2500 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 4900 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/150 m2 di TAPANULI SELATAN, WARISAN Rp. 125.000.000
7. Tanah Seluas 2500 m2 di TAPANULI SELATAN, WARISAN Rp. 75.000.000
8. Tanah Seluas 2500 m2 di TAPANULI SELATAN, WARISAN Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 532.293.434**

1. MOBIL, TIMOR SEDAN Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 480.993.434
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI



Rp. 16.300.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	374.780.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	173.698.619
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.660.772.053
III. HUTANG	Rp.	393.251.405
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.267.520.648

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **12 November 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.